

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Anton Syatno, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana, Jakarta, hlm. 114.
- Abdul Rachmad Budiono, 2018, *Aspek Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, Intrans Publishing, Malang, hlm. 104.
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, 2017, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 54.
- Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 2024, *Pedoman Penelitian Skripsi*, Jakarta, hlm. 24.
- Hendri Jayadi, 2021, *Buku Ajar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 12.
- Khudzaifah Dimiyati, 2015, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 14.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15.
- M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 1.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 184.
- Mark Fenwick dan Stefan Wrbka, (ed.), 2016, *The Shifting Meaning of Legal Certainty*, Springer, Singapore, hlm.6.
- Munir Fuady, 2017, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 141.
- Nasution, 2003, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 143.
- Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 28.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 29.

- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.
- Ranumhandoko, 2003, *Terminologi Hukum*, Grafika, Jakarta, hlm. 419.
- Robinson Sulaiman dan Joko Prabowo, 2002, *Lebih Jauh tentang Kepailitan, Tinjauan Yuridis, Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit*, Universitas Pelita Harapan, Karawaci, hlm. 32.
- Rudy A. Lontoh, dkk, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm. 1.
- Ridwan Khairandy, 2017, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 135.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Sinar Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 15.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.
- Soetandyo Wignijosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, hlm. 155.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Cetakan ke 3, Jakarta, hlm. 330.
- Salim HS, 2014, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 115.
- Salim HS, 2016, *Hukum Kepailitan: Teori dan Praktik di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 123.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 432.
- Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 283.

Tami Rusli, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung Press, Bandar Lampung, hlm. 9.

Umar Haris Sanjaya, 2014, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, NFP Publishing, Yogyakarta, Hlm. 19.

Widodo Dwi Putro, 2024, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2, Kencana, Jakarta, hlm 180.

Zainal Asikin, 2014, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 46-47.

#### B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Undang-Undang No.37 Pasal 222 – 285 tentang PKPU;

Undang-Undang No.37 Pasal 280 tentang Homologasi,

Undang-Undang No.37 Pasal 170 jo. 291 tentang Pembatalan Homologasi;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### C. JURNAL

Abustan, 2017, *Relasi Lembaga Negara Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, dalam *Jurnal Unifikasi*, Volume 04, Nomor 02, Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta.

Febri Yanti Casanova, Lindati Dwiatin, Dianne Eka R, 2018, *Analisis Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU.PN.Niaga.Jkt.Pst)*, dalam *Pactum Law Journal*, Volume 01, Nomor 02, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 95.

Francois Geny Ritonga, 2024, *Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Sebagai Upaya Hukum Bagi Kreditor Terhadap Debitor Yang Lalai Memenuhi Isi Perjanjian Perdamaian*, dalam *Jurnal Hukum to-ra*, Volume

10, No. 02, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, hlm. 81.

Keysha Nashwa Aulia, *et.al*, 2024, *Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi*, dalam *Jurnal Sains Student Research*, Volume 02, Nomor 01, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Kota Serang.

Mario Julyano, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, dalam *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Santriany Mahmudah, 2023, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan*. Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Volume 1, No. 1, hlm. 109.

Udin Silalahi dan Beatrix tanjung, 2021, *Perjanjian Perdamaian Pada Proses Pengunduhan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi*. Undang: Jurnal Hukum. Volume 4, No. 2, hlm. 373.

Yustika Arbinna Sari Br. Sitepu, 2023, *Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Studi Kasus 03/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga.Mdn Jo Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Mdn*, dalam *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Volume 2, Nomor 1, Hlm. 444.

#### D. WEBSITE

Aida Mardatillah, 2024, *Upaya Hukum Pembatalan Putusan Homologasi dalam PKPU*, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/upaya-hukum-pembatalan-putusan-homologasi-dalam-pkpu>, diakses pada 9 September 2025.

Fitri Novia Heriani, 2023, *Pasca Homologasi, Debitur Tak Bisa Dimohonkan PKPU Kembali*, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasca-homologasi--debitur-tak-bisa-dimohonkan-pkpu-kembali-lt657538b2ef636/>, diakses pada 9 September 2025.

Ihda Aulia Rahmah, 2023, *Pengingkaran Perjanjian Perdamaian oleh Debitor dalam PKPU*, tersedia pada <https://pdb-lawfirm.id/pengingkaran-perjanjian-perdamaian-oleh-debitor-dalam-pkpu>, diakses pada 1 Januari 2026.

- Marudut Pakpahan, 2022, *Kepailitan Suatu Perusahaan Yang Telah Dihomologasi Dalam Perkara Kepailitan/PKPU*, tersedia pada <https://tax-legal.id/update/kepailitan-suatu-perusahaan-yang-telah-dihomologasi-dalam-perkara-kepailitan-pkpu/149>, diakses pada 26 November 2025.
- Solusi Hukum, 2023, *Apa Yang Dimaksud Homologasi Dalam PKPU, Bisakah PKPU Diajukan Kembali Setelah Homologasi?*, tersedia pada <https://surabaya.inews.id/read/301332/apa-yang-dimaksud-homologasi-dalam-pkpu-bisakah-pkpu-diajukan-kembali-setelah-homologasi/3>, diakses pada 26 November 2025.
- Tim Hukumonline, 2022, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dbc/>, diakses tanggal 25 Januari 2025.



## BIODATA PENULIS

### DATA PRIBADI

Nama : Tobias Adika Setyaki  
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 09 Agustus 2003  
NIM : 2140050082  
Prodi : Hukum  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat Domisili : Banjar Wijaya Cluster Nusantara, Blok B.35 No.25  
RT 002/009, Kel. Cipete, Kec. Pinang.  
Kota Tangerang.



### RIWAYAT PENDIDIKAN

Penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Kristen Kanaan Tangerang pada tahun 2021, kemudian melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, penulis memiliki ketertarikan pada bidang Hukum Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), litigasi, dan hukum komersial. Ketertarikan tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai aspek hukum permohonan PKPU terhadap debitor yang telah memperoleh putusan homologasi.

Selain kegiatan akademik, penulis memperoleh pengalaman praktik hukum melalui keterlibatan pada kantor hukum Gendri Ririasih & Partners. Dalam kegiatan tersebut, penulis berkesempatan Mengikuti Proses persidangan serta terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Kepailitan dan PKPU, termasuk administrasi dan pelaksanaan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).